

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa konsep yang mengacu pada judul yang diangkat dalam penelitian ini, selain beberapa konsep yang akan diuraikan dalam bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan sebagai bahan pertimbangan maupun bahan yang akan mendukung dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan diuraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian lapangan yang sesuai judul yang diangkat dalam penelitian ini.

a. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa pengetahuan penulis dengan banyaknya karya ilmiah yang mengungkapkan tentang moralitas masyarakat eks lokalisasi. Berikut akan disajikan perbandingan atau relevansi dengan penelitian terdahulu, diantaranya seperti yang dilakukan oleh saudara/i:

Synaroch Fatimah (2013), penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi jurusan Sosiologi yang berjudul “Proses Penanaman Nilai Moralitas Siswa” studi di SMA Negeri 2 Kota Batu. Keberadaan peningkatan moralitas bagi siswa SMA sangat penting, baik dilihat dari proses maupun hasilnya. Dalam proses pendidikan di Indonesia, siswa SMA merupakan indikator keberhasilan peningkatan moralitas dan juga merupakan akumulasi hasil pendidikan mulai dari TK hingga SMA, lima atau sepuluh tahun berikutnya merekalah yang akan

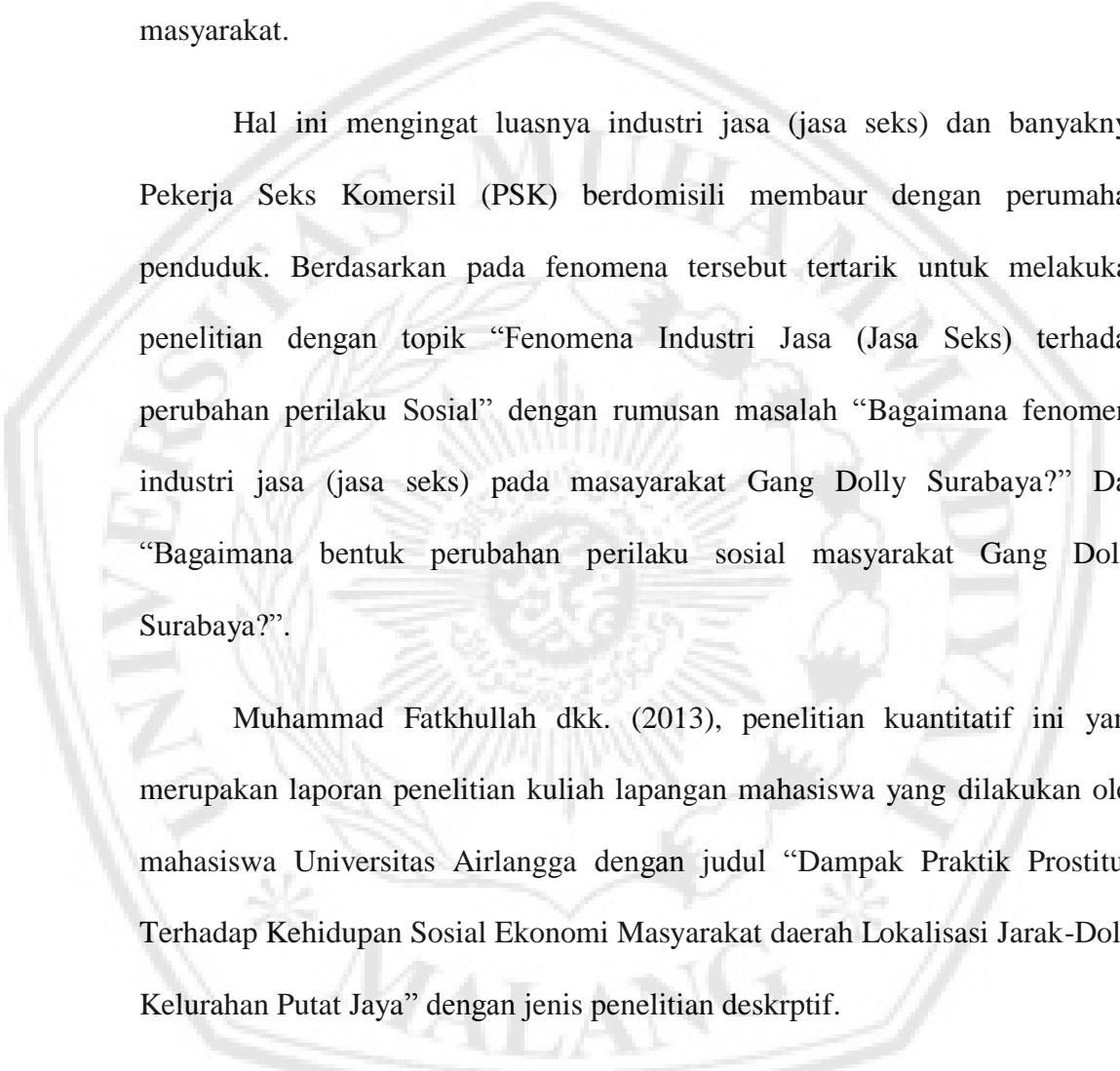
menghiasi perjalanan bangsa Indonesia, sehingga peletakan dasar moral yang baik menjadi suatu keharusan agar bangsa ini tidak semakin terpuruk pada kondisi degradasi moral yang luar biasa, demikian hanya tentang proses penanaman bilai moralitas siswa.

Kajian ini memfokuskan analisisnya pada proses penanaman nilai moralitas siswa, studi di SMA Negeri 2 Kota Batu, yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah proses meningkatkan kondisi moralitas siswa SMA Negeri 2 Kota Batu ditengah arus globalisasi yang menerpa kehidupan mereka. Latar belakang penelitian ini adalah tantangan globalisasi yang menyebabkan degradasi moral kaum remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami interaksi sosial, mengungkap perasaan, serta memahami makna dari kondisi moralitas siswa di balik data yang tampak.

Eni Setyowati (2007), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan kriteria subjek yang berkompeten dalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswi jurusan Sosiologi yang berjudul “Fenomena Industri Jasa (Jasa Seks) Terhadap Perubahan Prilaku Sosial” studi pada masyarakat Gang Dolly Kota Surabaya.

Semakin terpuruknya kondisi sosial ekonomi Indonesia karena tidak tersediannya pekerjaan, menyebabkan banyak bermunculan sektor industri salah satunya yaitu industry yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Banyak masyarakat memerlukan pekerjaan, namun lapangan pekerjaan terbatas

sehingga sektor industri jasa (jasa seks) menjadi alternatif yang dapat diharapkan untuk dijadikan sumber penghasilan. Kehadiran industri jasa (jasa seks) atau yang sering diasumsikan masyarakat sebagai lokalisasi pelacuran, tentunya akan membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat.

Hal ini mengingat luasnya industri jasa (jasa seks) dan banyaknya Pekerja Seks Komersil (PSK) berdomisili membaur dengan perumahan penduduk. Berdasarkan pada fenomena tersebut tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Fenomena Industri Jasa (Jasa Seks) terhadap perubahan perilaku Sosial” dengan rumusan masalah “Bagaimana fenomena industri jasa (jasa seks) pada masyarakat Gang Dolly Surabaya?” Dan “Bagaimana bentuk perubahan perilaku sosial masyarakat Gang Dolly Surabaya?”.


Muhammad Fatkhullah dkk. (2013), penelitian kuantitatif ini yang merupakan laporan penelitian kuliah lapangan mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga dengan judul “Dampak Praktik Prostitusi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat daerah Lokalisasi Jarak-Dolly Kelurahan Putat Jaya” dengan jenis penelitian deskriptif.

Dari segi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, lokalisasi merupakan sebuah fenomena yang mempunyai kaitan yang dimensional dan menimbulkan efek multiplier. Kemunculan lapangan kerja baru yang kemudian merangsang pertumbuhan ekonomi penduduk lokal, memancing jalan dan berkembangnya aktivitas ekonomi penduduk lokal yang mapan. Dampak sosial

dari eksistensi lokalisasi Dolly yang dirasakan oleh penduduk sekitar. Bentuk interaksi sosial para informan dengan pihak ekstern, masyarakat di daerah lokalisasi tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat, karena berdasarkan data yang ada, lebih dari 50% masyarakat yang tinggal disekitar lokalisasi Dolly dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kurang terbuka terhadap masyarakat luar.

Ainul Izzah (2007), Mahasiswa UMM Jurusan Kesejahteraan Sosial. Judul “Perilaku Beragama Pekerja Seks Komersial (PSK)” studi kasus di Yayasan Mojopahit Kelurahan Mentukan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah secara umum untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai positif dari kehidupan pekerja seks komersial di Yayasan Mojopahit Kota Mojokerto. Tujuan secara khususnya adalah mengetahui perilaku beragama dan perasaan serta suasana hati seorang PSK terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya.

Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Beberapa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian berhubungan dengan perilaku keagamaan yang mereka jalani dimana mereka merasa tenang pada saat melakukan sholat. Pihak yayasan pada dasarnya hanya bersifat memberi fasilitas-fasilitas saja dan tidak memberi bimbingan keagamaan secara langsung

dan rutin kepada PSK agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk spiritual begitupun dengan seorang PSK karena semua tindakan diri dan kehidupannya tidak terlepas dari nilai-nilai positif non materi yaitu kehidupan spiritual.

Diana Agustianingsih (April 2014), jurnal Ketahanan Nasional Nomor XX, Kodam V Brawijaya. Judul “Pengaruh Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi Prostitusi Dolly dan Maraknya Prostitusi Online Melalui Jejaring Sosial Facebook Serta Implikasinya Pada Ketahanan Sosial Budaya”. Masyarakat Surabaya menolak atau tidak mendukung keberadaan lokalisasi Dolly di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menolak prostitusi jejaring media sosial. Ditinjau dari pengaruhnya terhadap ketahanan sosial budaya Kota Surabaya, diperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara sikap penolakan masyarakat terhadap aktivitas prostitusi baik yang dilakukan di komplek lokalisasi Dolly maupun melalui jejaring sosial facebook dengan tingginya ketahanan sosial budaya Kota Surabaya.

Kebenaran nilai-nilai agama dan norma sosial yang dianut dan diyakini masyarakat Surabaya tidak seharusnya juga digunakan sebagai dasar untuk menghakimi bahkan membatasi ruang gerak bagi wanita pekerja seks dalam menjalani kehidupan sosialnya, karena hal tersebut dapat menjadi bayangan menakuti bagi wanita PSK untuk menjalani hidup normal dalam masyarakat.

Nida Issabela dan Wiwin Hendriani (2010), Fakultas Psikologi UNAIR, jurnal INSAN vol. 12 no. 03, Desember 2010 dengan judul: “Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari”. Bagi

masyarakat yang tinggal di lingkungan lokalisasi Dolly khususnya keluarga serta orang tua banyak hal yang dilakukan serta upaya preventif meliputi melakukan pengawasan anak yang meliputi pengetahuan mengenai siapa saja teman bermain anak, dimana anak bermain, apakah anak bermain dalam tempat yang dirasakan aman dari pengaruh negatif lokalisasi dan usaha ekstra untuk menjaga anggota keluarga mereka agar tidak terjerumus dalam pengaruh negatif lokalisasi, bagi orang tua membentengi diri anak-anak, menerapkan aturan ketat bagi anak-anak mereka, peraturan ini diwujudkan dalam jadwal harian yang harus dipenuhi oleh anak-anak, penginternalisasian nilai moral positif yang dianut orang tua pada anak. Berikut merupakan susunan table penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Hasil	Relevansi
1.	Synaroch Fatimah/ Sosiologi UMM/ “Proses Penanaman Nilai Moralitas Siswa” (studi di SMA Negeri 2 Kota Batu)/ dibuat tahun 2013.	Proses penanaman nilai moralitas siswa, mencakup komponen yang melibatkan penegakan disiplin dengkan keinginan siswa sehingga memberi kesempatan pada siswa untuk belajar lebih baik, kedua menghendaki keterikatan dengan seluruh warga sekolah dalam kehangatan sehingga tercipta kerelaan siswa untuk belajar dan ketiga adalah memberikan otonomi sehingga siswa	Persamaannya: Bahwa keterkaitan dalam hidup bermoral adalah suatu keharusan bagi seseorang yang berperilaku, bertindak laku dan bertindak dalam ruang masyarakat sehingga dalam suatu proses untuk meningkatkan moralitas dan dapat mencapai suatu tujuan dari moral masing-masing individu yang

		bertanggung jawab atas tindakan yang berdasarkan rasionalitasnya.	sudah dikehendaki oleh membuat system di dalam suatu kelompok masyarakat. Perbedaannya: merekondisikan moralitas masyarakat eks lokalisasi Dolly.
2.	Eni Setyowati/ Sosiologi UMM/ “Fenomena Industri Jasa (jasa seks) Terhadap Perubahan Prilaku Sosial” (studi pada masyarakat Gang Dolly Surabaya)/ dibuat tahun 2007.	Banyaknya masyarakat memerlukan pekerjaan, namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga sector industry jasa (jasa seks) menjadi alternative yang dapat diharapkan untuk dijadikan sumber penghasilan. Kehadiran industri jasa (jasa seks) atau yang sering diasumsikan oleh masyarakat sebagai lokalisasi pelacuran, tentunya akan membawa pengaruh terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat.	Persamaannya: Lingkungan mempengaruhi kebiasaan manusia, maksudnya kebiasaan manusia dalam perilaku dan tindakannya juga dapat mempengaruhi kehidupannya dalam suatu lingkungan. Perbedaannya: Maka dari itu, kebiasaan atau yang disebut dengal moral bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh Karena itu, relevansinya adalah bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kebiasaan atau moral masyarakat itu sendiri.
3.	Muhammad Fatkhullah dkk./2013/ Universitas Airlangga sebagai Laporan Penelitian Kuliah Lapangan Mahasiswa/	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari segi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, lokalisasi	Persamaannya: Peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian deskriptif dan tempat

	<p>Judul “Dampak Praktik Prostitusi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat daerah Lokalisasi Jarak-Dolly Kelurahan Putat Jaya”.</p>	<p>merupakan sebuah fenomena yang mempunyai kaitan yang dimensional dan menimbulkan efek multiplier. Kemunculan lapangan kerja baru yang kemudian merangsang pertumbuhan ekonomi penduduk lokal, memancing jalan dan berkembangnya aktivitas ekonomi penduduk lokal, memancing jalan dan berkembangnya aktifitasnya yang mapan. Dampak sosial dari eksistensi lokalisasi Dolly yang dirasakan oleh penduduk sekitar. Bentuk interaksi sosial para informan dengan pihak ekstern, masyarakat di daerah lokalisasi tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat, karena berdasarkan data yang ada, lebih dari 50% masyarakat yang tinggal disekitar lokalisasi Dolly dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kurang terbuka terhadap masyarakat luar.</p>	<p>penelitian serta mengemukakan suatu dampak sosial masyarakat dari adanya prostitusi itu sendiri.</p> <p>Perbedaannya: Pendekatan penelitian kuantitatif dan membahas tentang interaksi sosial masyarakat yang tidak terbuka dengan masyarakat di luar lingkungan lokalisasi.</p>
4.	<p>Ainul Izzah (2007)/ UMM/ Jurusan Kesejahteraan Sosial/ Judul “Perilaku Beragama Pekerja Seks Komersial (PSK)” studi kasus di Yayasan Mojopahit Kelurahan Mentukan</p>	<p>Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan</p>	<p>Persamaannya: Moralitas yang meliputi perilaku beragama seseorang sebagai tolak ukur bahwa seseorang tersebut mempunyai nilai-nilai kehidupan yang bermoral sosial, karenanya</p>

	Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.	keyakinan agama yang dianutnya. Beberapa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian berhubungan dengan perilaku keagamaan yang mereka jalani dimana mereka merasa tentram pada saat melakukan sholat. Pihak yayasan pada dasarnya hanya bersifat memberi fasilitas-fasilitas saja dan tidak memberi bimbingan keagamaan secara langsung dan rutin kepada PSK agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk spiritual begitupun dengan seorang PSK karena semua tindakan diri dan kehidupannya tidak terlepas dari nilai-nilai positif non materi yaitu kehidupan spiritual.	nilai moral yang dipegangnya sebagai penyeimbang sistem nilai norma sosial dalam lingkungannya. Perbedaannya: Tempat studi penelitian yang berada di Kota Mojokerto dan pekerja seks komersial sebagai objek utama di dalam studi penelitian ini.
5.	Diana Agustianingsih (April 2014)/ Kodam V Brawijaya/ Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XX/ Judul “Pengaruh Sikap Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi Prostitusi Dolly dan Maraknya Prostitusi Online Melalui Jejaring Sosial Facebook Serta Implikasinya Pada Ketahanan Sosial Budaya”.	Masyarakat Surabaya menolak atau tidak mendukung keberadaan lokalisasi Dolly di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menolak prostitusi jejaring media sosial. Ditinjau dari pengaruhnya terhadap ketahanan sosial budaya Kota Surabaya, diperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan anantara sikap penolakan masyarakat terhadap aktivitas	Persamaannya: Dampak yang dihasilkan dari keberadaan lokalisasi Dolly ini, menjadikan sikap masyarakat sekitar lokalisasi terganggu termasuk nilai moral, agama, sosial dll, yang dapat mempengaruhi ketahanan sosial budaya suatu sikap perubahan

		<p>prostitusi baik yang dilakukan di komplek lokalisasi Dolly maupun melalui jejaring sosial facebook dengan tingginya ketahanan sosial budaya Kota Surabaya.</p> <p>Kebenaran nilai-nilai agama dan norma sosial yang dianut dan diyakini masyarakat Surabaya tidak seharusnya juga digunakan sebagai dasar untuk menghakimi bahkan membatasi ruang gerak bagi wanita pekerja seks dalam menjalani kehidupan sosialnya karena hal tersebut dapat menjadi bayangan menakuti bagi wanita PSK untuk menjalani hidup normal dalam masyarakat.</p>	<p>masyarakat lokalisasi.</p> <p>Perbedaannya: Penelitian ini dilakukan ketika lokalisasi prostitusi Dolly masih aktif melakukan kegiatan prostitusinya sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan penelitian prostitusi online melalui jejaring sosial media.</p>
6.	<p>Nida Issabela dan Wiwin Hendriani/ Fakultas Psikologi UNAIR/ Jurnal INSAN vol. 12 no. 03, Desember 2010/ Judul: “Resiliensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari”.</p>	<p>Bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan lokalisasi Dolly khususnya keluarga serta orang tua banyak hal yang dilakukan serta upaya preventif meliputi melakukan pengawasan anak yang meliputi pengetahuan mengenai siapa saja teman bermain anak, dimana anak bermain, apakah anak bermain dalam tempat yang dirasakan aman dari pengaruh negatif lokalisasi dan usaha ekstra untuk menjaga anggota keluarga mereka agar tidak terjerumus</p>	<p>Persamaannya: Cara masyarakat beradaptasi dengan mempertahankan nilai moral keluarga serta anak-anaknya yang tinggal di sekitar lokalisasi Dolly, dengan berbagai upaya pencegahan agar nilai moral keluarga serta anak-anak tidak semakin tergerus oleh hal-hal yang dapat mempengaruhi moral psikis masyarakat (keluarga serta anak-anak).</p>

		dalam pengaruh negatif lokalisasi, bagi orang tua membentengi diri anak-anak, menerapkan aturan ketat bagi anak-anak mereka, peraturan ini diwujudkan dalam jadwal harian yang harus dipenuhi oleh anak-anak, penginternalisasian nilai moral positif yang dianut orang tua pada anak.	Perbedaannya: Terdapat pada kata “resiliensi” yang arti cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan berbagai dampak ke nilai moral masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di lingkungan lokalisasi Dolly.
--	--	--	--

b. Konsep Moralitas

Jika berbicara tentang etika, maka kita juga akan membicarakan tentang moral. Secara etimologi, istilah “Moral” berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata “moral” yaitu “mos” sedangkan bentuk jamaknya yaitu “mores” yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. ‘Moralitas’ (dari kata sifat Latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.²⁴

Sedangkan yang membedakan hanya Bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin. Jadi, bila kita mengatakan bahwa perbuatan asusila itu tidak bermoral, maka kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam

²⁴ Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk. 2015. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 131

masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pelacuran itu bermoral bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang tidak baik.

Istilah moral juga biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai:²⁵

1. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
2. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.

Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama baik atau buruk dinamakan moral. Moral terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik.
2. Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.

Moral dapat diukur secara subjektif dan objektif. Kata hati atau hati nurani memberikan ukuran yang subjektif, adapun norma memberikan ukuran yang objektif. Apabila hati nurani ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma akan membantu mencari kebaikan moral. Moral merupakan sesuatu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan diluar

²⁵ *Ibid.* Hal. 132

kawalan individu. Dorothy Emmet mengatakan bahwa manusia bergantung kepada tata susila, adat, kebiasaan masyarakat dan agama untuk membantu menilai tingkah laku seseorang.

Mencari unsur-unsur moralitas, terutama berarti mencari watak dasar, mencari keadaan-keadaan mental yang merupakan akar kehidupan moral. Bertindak secara moral manaati suatu norma, yang menetapkan perilaku apa yang harus diambil pada suatu saat tertentu, bahkan sebelum kita dituntut untuk bertindak. Demikian pula suatu tindakan yang bisa disebut amoral bila bertentangan dengan norma yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan, moralitas terdiri dari suatu system kaidah atau norma mengenai tindakan yang menentukan tingkah laku manusia atau masyarakat.²⁶

Hukum moral tidak dijalankan “dengan sendirinya”, melainkan merupakan himbauan kepada kemauan manusia. Hukum moral juga mengarahkan diri kepada kemauan manusia dengan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Hukum moral mewajibkan manusia memiliki kewajiban moral atau keharusan moral. Keharusan moral didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma-norma. Norma-norma adalah hukum, tapi manusia sendiri harus menaklukkan diri pada norma-norma itu sendiri. Manusia harus menerima dan menjalankannya.²⁷

²⁶ Abdullah, Taufik. 1986. Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 154,156,157.

²⁷ Sujarwa. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar edisi terbaru manusia dan fenomena sosial budaya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 214.

Menurut Bertens, beberapa bahasa modern dapat menyatakan perbedaan antara keharusan alamiah dan keharusan moral. Misalnya, kata dalam Bahasa Inggris *must*, *should* dan *ought to*, ketiganya berarti “harus”, tapi *must* secara khusus dipakai dalam arti keharusan alamiah, sedangkan *should* dan *ought to* dipakai dalam keharusan moral. Dalam bahasa Jerman kata *mussen* menunjukkan keharusan alamiah dan kata *sollen* digunakan dalam arti keharusan moral.

Menurut Badudu, Manusia yang bermoral adalah manusia yang berakhlak baik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diterangkan bahwa kata “moral” berarti akhlak, budi pekerti. Sedangkan kata “bermoral” adalah orang yang berakhlak baik. Adapun dalam Bahasa Inggris menurut M.Echol, kata “moral” lebih identik dengan kata “*morality*” yang artinya kesusilaan. Berangkat dari berbagai pemahaman pengertian diatas menunjukkan bahwa istilah “moralitas” memiliki arti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan dan perilaku manusia yang mengandung nilai akhlak maupun budi pekerti yang baik.²⁸

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa ukuran moralitas manusia memiliki standar yang berbeda-beda, karena sangat tergantung dari cara pandang masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang agamis tentu akan berbeda dengan masyarakat modern yang lebih moderat dalam menerima kemajuan. Masyarakat yang primitif dan tradisional tentu juga akan berbeda cara pandangnya dengan masyarakat agamis maupun masyarakat modern.

²⁸ *Ibid.* Hal. 215.

Perbedaan cara pandang yang terjadi sangat dipengaruhi oleh proses akumulasi yang mendasari nilai-nilai etika dan estetika dari suatu budaya masyarakat.

Perbedaan konsep klasik antara moralitas teoritis dan moralitas terapan adalah, pertama, tujuan moralitas teoritis adalah menyusun hukum umum moralitas, sedangkan moralitas terapan bertujuan menyelidiki bagaimana hukum tersebut diterapkan pada suasana umum yang bermacam ragam yang ditemukan dalam hidup. Moralitas adalah keseluruhan kaidah yang pasti dan jelas. Moralitas dapat diumpamakan seperti wadah dengan batas-batasnya yang jelas, dan kita harus menuangkan tindakan-tindakan kita ke dalam wadah itu. Disitu tampak jelas bahwa fungsi moralitas pertama-pertama adalah menentukan tingkah laku, menetapkan dan membatasi semua unsur yang bersifat semau-maunya saja.²⁹

Menjamin keteraturan hanya diperlukan kebiasaan-kebiasaan yang tertanam pada diri. Tapi dari definisinya, kebiasaan adalah daya-daya yang diinternalisasikan dalam pribadi seseorang. Sebaliknya, pada dasarnya kaidah adalah sesuatu yang berada di luar pribadi kita. Kaidah yang kita pahami sebagai suatu perintah, atau setidaknya nasihat yang mengikat, yang berasal dari luar diri kita. Bahwa dalam pengertian kaidah itu ada sesuatu yang selain keteraturan: yakni ide mengenai otoritas. Yang dimaksudkan dengan otoritas adalah pengaruh yang memaksakan kepada kita semua kekuatan moral yang kita akui sebagai sesuatu yang mengatasi kita.³⁰

²⁹ Abdullah, Taufik. 1986. Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 160

³⁰ *Op cit.* Hal. 162

Pada tahap awal pembentukan kepribadian misalnya, seorang bayi mulai mempelajari pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan cara mengadakan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini pertama-tama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Lambat laun setelah menjadi anak-anak dia mulai membedakan dirinya dengan orang lain. Dia mulai menyadari perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Bila ia melakukan perbuatan yang benar dia akan disukai oleh lingkungan dalam masyarakat dan bila berbuat salah dia akan ditegur. Tahap demi tahap seorang anak akan mempunyai konsep tentang dirinya, kesadaran itu dapat diamati dari tingkah laku dalam interaksinya dengan lingkungan bermasyarakat.

Maka dalam proses interaksi tersebut diperlukan nilai-nilai moral sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan dan bertindak serta panduan menentukan pilihan dan juga sebagai sarana untuk menimbang penilaian masyarakat terhadap sebuah tindakan yang akan diambil, dan nilai-nilai moralitas juga penting untuk menjaga rasa solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat serta dapat menjadi benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat tertentu.³¹

Dalam moralitas masalahnya lain sama sekali. Tentu saja bila kita melanggar kaidah moral kita dapat mengalami akibat yang kurang menyenangkan; mungkin dicela, nama baik kita rusak, atau juga menderita kerugian material, baik yang mengenai diri kita maupun harta milik kita. Disini kita dapat temukan unsur lain dari moralitas: selain unsur keteraturan, pada

³¹ Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk. 2015. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 133-134

dasar kehidupan moral terdapat makna otoritas. Unsur kedua moralitas berasal dari ide yang lebih kompleks merangkum keduanya, yakni konsep mengenai disiplin. Disiplin sebenarnya mengatur perilaku. Disiplin merangkum perilaku yang selalu terulang dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun tidak mungkin disiplin tanpa otoritas, yaitu otoritas yang mengaturnya. Oleh karena itu sebagai ringkasan dapat dikatakan bahwa unsur fundamental dari moralitas adalah semangat disiplin.³²

Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi sumber moralitas manusia dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal manusia. Faktor internal berupa pribadi dan karakter manusia. Faktor eksternal yang banyak mempengaruhi perilaku manusia antara lain: adat istiadat, budaya, agama dan segala hal yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang menjadi sumber moralitas bagi kehidupan manusia dalam suatu masyarakat atau bangsa banyak dipengaruhi oleh faktor internal, yang berupa pribadi manusia itu sendiri, maupun faktor eksternal.³³

Beragam bentuk nilai itulah yang kemudian mendasari adanya nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi sumber moralitas manusia. Kebudayaan dan agama dipandang mampu memberi inspirasi dan motivasi terbentuknya nilai-nilai yang mengakomodasi etika maupun norma-norma yang secara sistematis dapat diberlakukan di masyarakat. Dengan demikian tidak dapat disangkal, bahwa kebudayaan dan agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Namun

³² *Ibid.* Hal. 165

³³ Sujarwa. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar edisi terbaru manusia dan fenomena sosial budaya. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 216

demikian, dalam praktik sehari-hari motivasi terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Peran agama memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan “mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan”, jawaban yang selalu terlontar adalah “karena agama melarang” atau “karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan”. Secara umum ajaran moral yang terkandung dalam suatu agama dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: (1) Berupa aturan-aturan pokok yang harus dipedomani dalam prosesi ritual, seperti cara ibadah, sistem keyakinan dan syaratnya dan lain sebagainya. (2) Aturan moral yang lebih bersifat umum, karena kepentingannya menyangkut orang banyak yang bisa jadi berbeda agama atau keyakinan, antara lain: larangan membunuh, berdusta, berzina dan mencuri.³⁴

c. Konsep Prostitusi

Kata prostitusi identik dengan kata asing, dalam bahasa latin: prostituerematau pro-staures, berarti membiarkan diri berbuat zina atau melakukan perbuatan pencabulan. Sementara itu Soedjono D, mengatakan bahwa prostitusi sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan”. Menurut Kartini Kartono mengemukakan definisinya bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.³⁵

³⁴ *Ibid.* Hal. 218-219

³⁵ Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial* jilid 1. Jakarta: Grafindo Persda. Hal. 185

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, akan diketengahkan pula berbagai interpretasi dari beberapa ahli tentang pelacuran atau prostitusi itu, antara lain:

1. W. A. Bonger, dalam bukunya “Versprede Geschiften” antara lain mengemukakan: “prostitutie het maatshapelijke vershijnsel dat vrowen zich beroepsmatig tot hel plegen van sexuele handelingen” (prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya).

Pada definisi ini dijelaskan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi seksual.

2. F. J. De Bruine van Amstel menyatakan, prostitusi adalah penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Definisi diatas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.

3. G. May dalam bukunya “Encyclopedia of Social Science” menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya.³⁶

Eksplotasi seks berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedang komersialisasi seks berarti perdagangan seks dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan

³⁶ Opcit. Hal. 183-184

benda-benda, materi dan uang. Selanjutnya, perbuatan melacurkan diri dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (amateurisme), maupun pekerja penuh atau profesi. Pelacur wanita disebut dalam bahasa asingnya prostitute, sedang penamaan kasarnya adalah sundal, balon, lonte. Maka kira-kira pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama para petugas Dinas Sosial, digunakan istilah eufemistik untuk memperhalus artinya, ialah: wanita tuna susila. Sedang pelacur pria disebut gigolo.

Sementara para ahli ilmu sosial sepakat mengkategorikan pelacuran ini ke dalam “Patologi Sosial” atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya. Prostitusi dipandang dari segi kehidupan sosial, seperti yang dikatakan J. Verkuyl bahwa: “Kita melarang pelacuran, tetapi sebaliknya kita dapat terima juga sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, kita memandang pelacuran sebagai sesuatu yang hina tetapi sebaliknya kita hargai pula sebagai katup pengaman yang sangat diperlukan”.

1. Jenis Prostitusi

Jenis Prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya, yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.

a. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus

memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Mereka yang melakukan aktivitasnya secara tersembunyi dan liar, baik secara perorangan atau kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya tidak menentu. Mereka tidak mencatatkan dirinya kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksa kesehatannya kepada dokter.

Menurut jumlah prostitusi dapat dibagi dalam:

- a. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator.
- b. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur oleh satu sistem kerja suatu organisasi.³⁷

d. Konsep Patologis

Pada awal abad ke-19 dan awal abad 20-an, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, hal milik,

³⁷ Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial jilid 1. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 214-215

solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, hukum formal dan termasuk moral.³⁸ Secara etimologis, kata patalogi berasal dari kata pathos yang berarti disease/penderitaan/penyakit dan logos yang berarti berbicara tentang ilmu. Jadi patologi adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit.³⁹ Maksud dari pengertian di atas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal-usul dan sifat-sifatnya penyakit.

Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Tetapi, dalam arti yang lebih luas yaitu community atau masyarakat. Maka pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Sementara itu. Menurut Koe Soe Khiam, teori anomi bahwa patologi sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian anatara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikat sosial patah sama sekali.⁴⁰

Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat

³⁸ Opcit. Hal. 1

³⁹ Winarno, Taufiq. Jurnal: Pengertian, Latar Belakang, dan Sejarah Patologi Sosial. diakses pada 09/04/17 pukul 11.14 WIB

⁴⁰ Opcit. diakses pada 09/04/17 pukul 11.14 WIB

pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan, mekanis, industrialisasi, dan urbanisasi, dll.⁴¹ Hal ini mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan hal-hal negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang biasa disebut masalah sosial. Adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepat perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakta yang tidak seimbang dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial telah menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Misalnya, lokalisasi Dolly yang bermukim di sekitar lingkungan warga masyarakat dan anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut secara langsung dan tidak sengaja menggerus nilai dan norma sosial terutama nilai moral manusia yang tinggal di kawasan tersebut.

Pada akhirnya keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan (*social problem*) terutama pada masyarakat dan anak-anak di kawasan lokalisasi Dolly tersebut. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustmen menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik. Baik bersifat internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternalnya sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan melakukan sesuatu apapun demi kepentingan sendiri bahkan cenderung merugikan orang lain.⁴²

⁴¹ Kartini, Kartono. 2005. Patologi sosial. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. Hal. 5

⁴² Ibid. Diakses pada 09/04/17 pukul 11.38 WIB

Disebut sebagai masalah sosial ialah jika:⁴³

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup sesama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang lain.

Bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Maka tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma, dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, dianggap sebagai masalah sosial.

Menurut kartini dalam bukunya “patologi sosial” menyatakan bahwa orang yang dianggap kompeten. Sekalipun adakalanya masyarakat membuat kesalahan atau kekeliruan dalam membuat analisis atau penilaian terhadap gejala sosial, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau yang perlu diubah dan diperbaiki. Ada orang yang berpendapat bahwa pertimbangan nilai (*value, judgement*, mengenai baik dan buruk) sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang objektif sebab penilaian itu sifatnya sangat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan murni harus

⁴³ Ibid. Hal. 2

meninggalkan generalisasi-generalisasi etis dan penilaian etis (susila, baik dan buruk). Sebaliknya kelompok lain berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmunan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai sebab opini mereka selalu saja merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu.

Untuk menjawab dua pendirian yang kontroversial tersebut, kita dapat meninjau kembali masalah ini secara mendalam dari beberapa point yang disebutkan oleh Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial”, sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan menyangkut masalah mempertanyakan dan memecahkan kesulitan hidup secara sistematis selalu dengan jalan menggunakan metode dan teknik-teknik yang berguna dan bernilai. Disebut bernilai karena dapat memenuhi kebutuhan manusiawi yang universal ini, baik yang individual maupun sifatnya sosial, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai.
2. Ada keyakinan etis pada diri manusia bahwa penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam (kosmos, jagad) sangatlah diperlukan demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Jadi ilmu pengetahuan dengan sendirinya memiliki sistem nilai. Lagi pula kaum ilmunan selalu saja memilih dan mengembangkan

usaha/aktivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi memilih masalah dan usaha yang mempunyai nilai praktis.

3. Falsafah yang demokratis sebagaimana tercantum dalam pancasila menyatakan bahwa baik individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia, pasti mampu memformulasikan serta menentukan sistem nilai masing-masing dan sanggup menentukan tujuan serta sasaran yang bernilai bagi hidupnya.

Diperkuat oleh C. C. North, seorang sosiolog lain dalam bukunya *“Social Problem and Social Planning”*, menyatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran hidup yang bernilai bagi satu kebudayaan atau satu masyarakat, harus disertai etik sosial guna menentukan cara pencapaian sasaran tadi. Jadi, cara atau metode pencapaian itu secara etis-susila harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebab manusia normal dibekali alam dengan budaya dan hati nurani sehingga ia dianggap mampu menilai baik dan buruknya suatu peristiwa.⁴⁴ Adapun istilah atau konsep untuk patologi sosial adalah, masalah sosial, disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial, sosial adjustmen, sosiopatik, abnormal, sosiatri. Tingkah laku sosiopatik jika diselidiki melalui pendekatan sosiologis, sebagai berikut:

Penyebab sosiopatik adalah murni sosiologis yaitu tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan norma umum yang pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial “tidak setuju”. Reaksi sosial dari masyarakat antara lain berupa: hukuman,

⁴⁴ Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial jilid 1. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 4

segregasi (pengucilan/pengsingan). Contoh: mafia (komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba) dan pelacur (lokalisasi atau tidak di lokalisasi).

Menurut St. Yembiarto (1981) bahwa studi patologi sosial memiliki fase-fase tersendiri.⁴⁵ Adapun perkembangan patologi sosial melalui tiga fase, yaitu:

1. Fase masalah sosial (social problem)

Pada fase ini menjadi penyelidikan patologi sosial action masalah-masalah sosial seperti pengangguran, pelacuran, kejahatan, masalah penduduk, dst.

2. Fase disorganisasi sosial

Pada fase ini menjadi objek penyelidikan peksos adalah disorganisasi sosial, fase ini merupakan koreksi dan perkembangan dan fase masalah sosial.

3. Fase sistematik

Fase ini merupakan perkembangan dari dua fase sebelumnya. Pada fase ini patologi sosial berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang memiliki sistem yang bulat.

e. Konsep Lokalisasi

Menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:⁴⁶

⁴⁵ Winarno, Taufiq. Jurnal: Pengertian, Latar Belakang, dan Sejarah Patologi Sosial. diakses pada 09/04/17 pukul 13.35 WIB

- a. Segresi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah”, atau petak-petak daerah tertutup.
- b. Rumah-rumah panggilan (*call haouse, tempat randezvous, parlour*).
- c. Dibalik front-organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

Lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di luar negeri, germo mendapat sebutan “madam”, sedang di Indonesia biasa dipanggil dengan sebutan “mama” atau “mami”. Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, rumah tamu, pakaian dan alat tata rias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter atau suku bangsa yang berbeda. Disiplin di tempat-tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat, misalnya tidak boleh mencuri uang pelanggan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan janji di luar, dilarang memonopoli seorang pelanggan, dan lain-lain. Wanita-wanita pelacur itu harus membayar pajak-rumah dan pajak obat-obatan sekaligus juga uang keamanan agar mereka terlindungi dan terjamin identitasnya. Tujuan dari lokalisasi, ialah:

- a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan adolens dari pengaruh immoral dari praktek pelacuran. Juga

⁴⁶ Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial jilid 1. Jakarta: Grafindo Persada. Hal. 216-217

menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung elang terhadap wanita-wanita baik.

- b. Memudahkan pengawasan terhadap wanita tuna susila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin.
- c. Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang paling lemah.
- d. Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitas dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan keterampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan.
- e. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tuna susila yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar. Selanjutnya ada dari mereka yang diikutsertakan dalam program transmigrasi, setelah mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah baru.

B. Landasan Teori Moralitas

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, peneliti telah menggunakan teori moralitas menurut Emile Durkheim yang secara sentral memerhatikan moralitas karena disisi lain, Durkheim adalah tradisionalis Karena dia tidak percaya bahwa orang benar-benar dapat menciptakan suatu moralitas yang

baru. Setiap moralitas yang baru hanya dapat bertumbuh dari tradisi-tradisi moral kolektif. Durkheim menegaskan bahwa orang harus “melihat di dalam moralitas itu sendiri suatu fakta yang harus diselidiki hakikatnya dengan penuh perhatian, bahkan dengan penuh hormat, sebelum berani untuk memodifikasi”. Teori moralitas sosiologis Durkheim melampaui pendirian-pendirian mengenai moralitas masa kini dan memberikan kemungkinan akan suatu perspektif yang segar mengenai perdebatan kontemporer atas isu-isu seperti apa yang peneliti saat ini, keluarga-keluarga tradisional dan muatan moral kebudayaan populer.

Moralitas bagi Durkheim, mempunyai tiga aspek. *Pertama*, moralitas meliputi disiplin, yakni suatu perasaan akan otoritas yang melawan dorongan-dorongan hati yang idiosinkratik. *Kedua*, moralitas meliputi kelekatan kepada masyarakat karena masyarakat adalah sumber moralitas. *Ketiga*, moralitas meliputi otonomi, suatu perasaan akan tanggung jawab individual atas tindakan-tindakan.⁴⁷

a. Aspek Disiplin

Durkheim biasanya mendiskusikan disiplin dalam kerangka pengendalian atas dorongan-dorongan hati egoistik seseorang. Pengendalian demikian perlu karena kepentingan-kepentingan individual dan kepentingan-kepentingan kelompok tidak sama dan mungkin, setidaknya dalam jangka waktu yang singkat, bertentangan. Disiplin menghadapkan seseorang dengan tugas moralnya, yang bagi Durkheim, adalah tugas seseorang kepada masyarakat. Seperti yang didiskusikan diatas, disiplin sosial itu juga membuat individu lebih bahagia karena membatasi keinginan-keinginannya yang tidak

⁴⁷ Ritzer, George. 2012. Edisi kedelapan. Teori Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 178

terbatas sehingga memberikan kesempatan satu-satunya untuk bahagia karena kalau tidak ia akan selalu menginginkan hal yang lebih.

b. Aspek Kelekatan

Durkheim tidak melihat moralitas hanya sebagai masalah pengendalian. Unsur kedua di dalam moralitas adalah kelekatan kepada kelompok-kelompok sosial yang tidak berasal dari kewajiban eksternal, tetapi dari kelekatan yang sukarela.

Masyarakatlah yang kita anggap sebagai bagian paling penting dari diri kita. Dari sudut pandang tersebut, orang siap melihat bagaimana masyarakat menjadi hal yang mengikat kita. Sebenarnya, kita tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat tanpa memotong diri kita dari diri kita sendiri. Di antara masyarakat dan kita ada hubungan yang paling kuat dan paling intim, karena masyarakat adalah bagian dari keberadaan kita, karena di dalam arti tertentu masyarakat merupakan hal yang terbaik di dalam diri kita. Akibatnya, ketika kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga sesuatu selain diri kita. Oleh karena itu, sebagaimana moralitas membatasi dan mengendalikan kita, untuk memenuhi syarat-syarat hakikat kita, begitu jugalah dalam mengharuskan komitmen kita dan mensubordinasikannya kepada kelompok yaitu masyarakat.

Kedua unsur moralitas ini (disiplin dan kelekatan) saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain karena mereka hanyalah aspek-aspek masyarakat yang berbeda. Disiplin adalah masyarakat dilihat mengajukan

tuntutan kepada kita, dan kelekatan adalah masyarakat dilihat sebagai dari kita.

c. Aspek Otonomi

Durkheim mengikuti definisi filosofis Immanuel Kant dan melihatnya sebagai suatu dorongan hati berbasis rasional dari keinginan dan kehendak, dengan simpul sosiologis bahwa pendasaran rasional pada akhirnya bersifat sosial. Fokus Durkheim pada masyarakat sebagai sumber moralitas telah menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa aktor idealnya adalah orang yang hampir seluruhnya dikendalikan dari luar (seorang konformis total). Akan tetapi, Durkheim tidak menganut pandangan aktor yang ekstrem seperti itu: “Konformitas tidak boleh didorong hingga titik yang menundukkan intelek secara lengkap. Karena itu, konformitas tidak berasal dari suatu kepercayaan akan perlunya disiplin yang harus membata dan membudak”.

Otonomi mencapai daya penuhnya di dalam modernitas hanya seiring dengan kemunduran mitos-mitos dan simbol-simbol yang digunakan oleh sistem-sistem moral sebelumnya untuk menuntut disiplin dan mendorong kelekatan. Durkheim percaya bahwa kini mitos-mitos tersebut telah berlalu, hanya pengertian ilmiah saja yang dapat memberikan fondasi untuk otonomi moral. Khususnya, moralitas modern harus didasarkan pada hubungan antara individu dan masyarakat seperti yang disingkapkan oleh ilmu Durkheim yang baru yaitu sosiologi. Satu-satunya cara agar pengertian sosiologis tersebut menjadi moralitas yang sejati ialah melalui pendidikan.

